

MEMBANGUN FONDASI LITERASI MEDIA: STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA DISINFORMASI DIGITAL

Rafli Ramandhika^{1*}, Lovena Putri Jehova², Iqbal Ramadhan³, Syarifah Adilla⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Pamulang

*E-mail: rafliramandhika.00@gmail.com

ABSTRAK

Pada era digital sekarang, Indonesia sedang menghadapi tantangan dari derasnya arus informasi. Karena hal ini, masyarakat Indonesia mengalami krisis dalam kemampuan berpikir kritis dan literasi media padahal seharusnya kemudahan akses informasi dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan verifikasi informasi dengan cara yang mudah. Masyarakat cenderung menerima dan menyebarkan konten secara mentah tanpa proses penyaringan, verifikasi, atau analisis kritis. Masalah utamanya adalah dari minat masyarakat untuk melakukan literasi. Penelitian ini berupaya untuk secara mendalam menganalisis akar permasalahan di balik krisis literasi digital ini dan menemukan solusi untuk membangun fondasi literasi media yang kuat. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia agar lebih bijak ditengah derasnya arus informasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini secara komprehensif mengkaji fenomena penyebaran hoaks dan dampaknya pada pola berpikir di masyarakat Indonesia. Temuan penelitian dengan tegas menunjukkan bahwa peningkatan literasi media tidak hanya sebatas tanggung jawab individual semata; namun, perlu melibatkan aspek pendidikan secara penuh. Oleh karena itu, diperlukan perumusan dan implementasi strategi komprehensif yang melibatkan kolaborasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan—termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan industri teknologi untuk membekali setiap individu dengan keterampilan esensial dalam menyaring, menganalisis secara kritis, dan mengevaluasi informasi secara mandiri dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan akhir untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya cerdas informasi tetapi juga bijak dalam menghadapi manipulasi di era disinformasi yang penuh tantangan.

Kata Kunci: Literasi Digital, Berpikir Kritis, Hoaks, Disinformasi, Sumber Daya Manusia

ABSTRACT

In the current digital era, Indonesia is facing challenges from the overwhelming flow of information. As a result, Indonesian society is experiencing a crisis in critical thinking and media literacy skills, even though easy access to information should be utilized by the public for simple information verification. People tend to rawly accept and disseminate content without a process of filtering, verification, or critical analysis. The main issue stems from the public's interest in engaging in literacy. This research attempts to deeply analyze the root problems behind this digital literacy crisis and find solutions to build a strong foundation of media literacy. The primary goal is to improve the quality of human resources in Indonesia to be wiser amidst the rapid flow of information. Using a descriptive qualitative approach, this study comprehensively examines the phenomenon of hoax dissemination and its impact on thought patterns in Indonesian society. Research findings strongly indicate that improving media literacy is not merely an individual responsibility; instead, it needs to fully involve the educational aspect. Therefore, the formulation and implementation of comprehensive strategies are required, involving active collaboration from various stakeholders—including the government, educational institutions, civil society, and the technology industry—to equip every individual with essential skills in filtering, critically analyzing, and evaluating

information independently and responsibly. The ultimate aim is to create a society that is not only information-savvy but also wise in facing manipulation in a challenging era of disinformation.

Keywords: Digital Literacy, Critical Thinking, Hoaxes, Disinformation, Human Resources

PENDAHULUAN

Di tengah hiruk-pikuk era digital, Indonesia mengalami krisis yang jarang dibahas secara jujur. Krisis kemampuan berpikir. Bukan karena kurangnya akses informasi, melainkan karena banjir informasi justru diterima mentah-mentah tanpa disaring, tanpa dikritisi. Literasi media yang seharusnya menjadi benteng kognitif justru menjadi titik lemah. Rakyat terpapar hoaks setiap hari, bukan karena mereka bodoh secara individu, tapi karena sistem pendidikan dan budaya berpikir bangsa ini belum mendukung kemampuan literasi secara struktural dan masif.

Literasi didefinisikan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, memhami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi dan menghitung, menggunakan bahan cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks. Literasi melibatkan rangkaian pembelajaran yang memungkinkan individu untuk mencapai tujuannya, mengembangkan potensi dan pengetahuannya, dan berpartisipasi penuh dalam komunitasnya dan masyarakat luas.

Berdasarkan bukti di lapangan dan yang beredar di berita, tidak bisa dibantah. Data yang berasal dari UNESCO menunjukkan bahwa statistik literasi masyarakat Indonesia tergolong rendah, berada di posisi ke-60 dari 61 negara pada 2016. Laporan Most Literate Nations in the World oleh John W. Miller bahkan menyebut Indonesia nyaris di dasar. Survei terbaru dari Program for International Student Assessment (PISA) menempatkan siswa Indonesia di bawah rata-rata global dalam hal membaca dan berpikir kritis. Bahkan, dikutip dari artikel tempo, menurut World Population Review, di tahun 2024 ini, rata-rata IQ masyarakat Indonesia hanya 78, angka yang mengkhawatirkan jika dihubungkan dengan kemampuan mengenali dan menyaring berita disinformasi digital.

Kondisi media massa yang ada di Indonesia berpihak pada aspek politik dan kepentingan modal tertentu memang menjadi hambatan bagi bangsa ini. Sementara di sisi lain, pemerintah tidak dapat memberikan perhatian lebih untuk masyarakat lewat regulasi yang baik, tapi justru mendukung industri media. Oleh karena itu,

kami percaya bahwa literasi media, dan juga pemantauan media, bisa menjadi sebuah jalan bagi khalayak untuk lebih berdaya di hadapan media. Lebih dari itu, gerakan literasi media dan pemantauan media pada akhirnya bisa memberi pengaruh bagi perbaikan media dan tentu pada perbaikan kualitas demokrasi.

Pada era sekarang kita perlu menaruh perhatian penuh terhadap teknologi. Kemajuan teknologi informasi, terutama media sosial, berperan besar dalam mempercepat penyebaran hoaks dan disinformasi. Algoritma platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dirancang untuk memprioritaskan konten yang menarik perhatian, seringkali tanpa mempertimbangkan validitas informasi yang disebarluaskan (Vosoughi et al., 2018). Dalam konteks ini, media lebih mementingkan untuk menyebarkan berita palsu yang berbau sensasional dibandingkan berita yang memiliki nilai informasi yang akurat, karena berita palsu sering kali lebih menarik secara emosional. Hal ini memberikan keuntungan besar terhadap media sehingga media menganggap bahwa penyebaran berita palsu yang sensasional lebih menguntungkan.

Untuk itu solusi yang paling tepat dalam mengurangi disinformasi digital yang dialami di Indonesia adalah dengan memberikan edukasi yang cukup terhadap sumber daya manusia dalam melakukan literasi digital. Memperbaiki Sumber Daya Manusia merupakan aspek yang paling sederhana dalam solusi permasalahan Disinformasi digital. Disinformasi media sangat berpengaruh dalam menghambat pengembangan sumber daya manusia.

Implikasi dari terhambatnya pertumbuhan SDM ini tidak hanya terbatas pada level individu, melainkan meluas hingga memengaruhi perkembangan pembangunan nasional. SDM yang kurang memiliki kemandirian berpikir dan mudah terpengaruh disinformasi cenderung kurang inovatif, kurang adaptif, serta menghadapi kesulitan dalam berkontribusi secara optimal di berbagai sektor. Kondisi ini pada gilirannya dapat melemahkan daya saing bangsa di ranah global dan menghambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Pengertian literasi menurut UNESCO ternyata memiliki makna yang luas. Mereka merumuskan bahwa literasi merupakan proses pengajaran seumur hidup dan menekankan pada bagaimana seseorang mengolah informasi dan mengambil keputusan dalam suatu disiplin ilmu. Ini membuktikan bahwa literasi memiliki

dampak dengan jangka panjang kearah positif untuk setiap individu kedepannya. Sebaliknya, jika literasi tidak dijalankan dampaknya akan tertuju kearah negatif yang menghambat individu bahkan keseluruhan negara.

Literasi digital merupakan suatu bentuk keahlian dalam mendapatkan, memahami serta menggunakan informasi yang berasal dari sumber informasi dalam bentuk digital. Literasi digital perlu dilakukan untuk mengatasi masalah adanya informasi semakin banyak yang diperkirakan akan terus meningkat di dalam sumber digital. Sehingga dengan adanya literasi digital masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk mengelola dan memahami informasi yang baik agar dapat dipelajari dan dimengerti di perkembangan teknologi yang pesat ini (Naufal, 2021).

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) menganalisis literasi digital di kalangan anak-anak, berdasarkan konsultasi dengan 37 kantor negara dan regional UNICEF. Menurut UNICEF, isu-isu paling penting dan tantangan paling mendesak yang harus direspon oleh para pemangku kebijakan adalah kurangnya kapasitas guru dalam literasi digital, masalah konektivitas dan infrastruktur, dan pemahaman pemerintah yang terbatas tentang isu literasi digital. UNICEF sendiri kemudian mengembangkan apa yang disebut sebagai “literasi digital untuk anak-anak” (*digital literacy of children*), sebuah konsep literasi digital yang secara khusus berfokus pada anak-anak atau peserta didik.

Lembaga UNICEF merumuskan definisi literasi digital yang lebih memfokuskan pada anak-anak atau peserta didik, karena literasi digital lebih efektif dilatih sejak usia anak-anak. UNICEF mendefinisikan bahwa literasi digital mengacu pada pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitudes*) yang memungkinkan anak-anak tumbuh dan berkembang di dunia digital yang semakin global secara aman dan berdaya, dengan cara yang sesuai dengan usia serta konteks dan budaya lokal mereka. Definisi ini membantu permasalahan literasi digital dengan melatih masyarakat dari usia anak-anak sehingga mereka terbiasa dengan literasi digital seiring dengan perkembangan digital yang ada dan membantu membangun sikap yang bijak dalam melakukan literasi digital.

Contoh kasus pemberitaan Raja Ampat, yang memicu polarisasi antara mereka yang mendukungnya sebagai kelanjutan kebijakan pendapatan warga Gag dan mereka yang menentang karena potensi kerusakan lingkungan akibat

pertambangan, merupakan bukti nyata bagaimana narasi yang berbeda dapat menciptakan kesenjangan pemahaman di masyarakat. Fenomena ini menyoroti kebutuhan mendesak akan literasi media yang mumpuni untuk meningkatkan kapasitas pada sumber daya manusia untuk berpikir kritis dalam menghadapi derasnya informasi yang seringkali penuh disinformasi dan memecah belah.

Karya ilmiah ini berasumsi bahwa solusi mendasar untuk melawan disinformasi sekaligus mendorong peningkatan mutu SDM adalah melalui peningkatan minat literasi di kalangan masyarakat Indonesia. Literasi, dalam konteks ini, tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, melainkan juga mencakup kecakapan untuk memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Dengan mengakar kuatnya minat literasi, diharapkan masyarakat akan memiliki kemampuan intelektual terhadap gelombang disinformasi, mampu membedakan fakta dari opini yang bias, serta bertransformasi menjadi individu yang proaktif dan kritis. Upaya ini merupakan investasi strategis yang tidak hanya akan meningkatkan kualitas individu, tetapi juga menjadi pilar fundamental bagi terwujudnya pembangunan bangsa yang kuat dan berdaya saing.

KERANGKA BERPIKIR

1. Membangun Fondasi Literasi Media di Era Disinformasi Digital
2. Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Pada Pengguna Media Sosial Tiktok
2. Pada Para Buzzer Dan Influencer

Paradigma: Kritis
Jenis Penelitian: Kualitatif
Landasan Teori: Teori Literasi Media
Landasan Konsep: Komunikasi Massa

Membangun Fondasi Literasi Media: Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Era Disinformasi Digital

Kualitatif - Deduktif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif guna menggambarkan dan menganalisis fenomena rendahnya literasi media di Indonesia serta implikasinya terhadap kualitas sumber daya manusia. Data diperoleh melalui metode studi pustaka dan analisis dokumentasi dengan mengkaji berbagai sumber seperti laporan UNESCO, data PISA, artikel ilmiah, serta berita-berita media massa terkait disinformasi dan literasi digital di Indonesia. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola-pola penyebaran disinformasi serta keterkaitan antara rendahnya literasi media dan kualitas sumber daya manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ANALISIS PERMASALAHAN TAMBANG RAJA AMPAT TERHADAP SUMBER DAYA MANUSIA DAN LITERASI MEDIA

Dalam salah satu akun di aplikasi TikTok seorang *content creator* bernama Geralt Vincent membuat konten video yang menjelaskan apa itu Raja Ampat dan apa yang sedang terjadi pada Raja Ampat saat ini. Video yang diposting menembus sampai 3,7 juta lebih penonton dan terus bertambah sampai saat ini, Video ini sangat menarik perhatian para pengguna aplikasi Tiktok untuk memberikan komentar sesuai pendapat mereka pribadi. Selain komentar pribadi yang banyak menyebabkan pro dan kontra, ada juga komentar dengan isi tulisan yang sama dan diduga merupakan *buzzer* yang mampu mempengaruhi opini public yang sebenarnya belum benar dan berpihak pada golongan tertentu. Faktanya pada kolom komentar banyak netizen yang berkomentar mendukung perlindungan terhadap Raja Ampat namun ada beberapa netizen juga ingin bahwa penambangan nikel di Raja Ampat dilanjutkan.

Salah satu akun di aplikasi Tiktok, seorang *content creator* bernama seukeut.babatok membuat konten video yang menjelaskan bagaimana awal mula perijinan tambang di Raja Ampat, menjelaskan tentang apa yang terjadi di Raja Ampat, menjelaskan bahwa foto yang terjadi di Raja Ampat itu adalah foto editan AI, dan Content creator juga menjelaskan bahwa kasus tambang

di Raja Ampat bukan kesalahan pemerintahan sekarang namun kesalahan dari pemerintah orde baru yang memberikan ijin kepada beberapa perusahaan untuk mengelola pertambangan di Raja Ampat. Sedangkan dalam platform lain seperti aplikasi X, banyak yang menggiring opini bahwa kerusakan yang terjadi diakibatkan oleh pemerintahan sekarang. Vidio tersebut viral dan sudah ditonton sebanyak 1 juta kali dan masih bertambah hingga saat ini. Para penonton ikut berpartisipasi dalam membuat opini di dalam kolom komentar. Dalam isi komentar di akun itu menunjukkan sisi positif dan memang banyak yang setuju jika dilihat dari sudut pandang akun tersebut dan pengikutnya yang merasa opininya ini benar.

B. HASIL ANALISIS

Dalam konteks perbandingan antara dua akun yang memiliki pandangan berseberangan terhadap suatu isu, terlihat jelas bagaimana perbedaan posisi ini tidak hanya mencerminkan keberagaman opini, tetapi juga menunjukkan rendahnya tingkat literasi media di kalangan masyarakat Indonesia. Alih-alih mendorong dialog yang solutif dan berbasis data, konten-konten yang diproduksi oleh kedua belah pihak justru memperkuat polarisasi dengan narasi yang bersifat defensif terhadap kelompok yang didukungnya. Sebagai pemateri yang mengkaji isu ini dari sudut pandang literasi media, saya menilai bahwa fenomena ini menjadi indikasi lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengevaluasi informasi secara kritis, sehingga diskursus publik lebih condong pada pembentukan kubu-kubu yang saling menyerang ketimbang mendorong pemahaman kolektif terhadap permasalahan yang diangkat.

Fenomena ini selaras dengan konsep filter bubble yang dikemukakan oleh Eli Pariser, di mana algoritma media digital secara tidak langsung mengurung individu dalam ruang gema (echo chamber) yang hanya memperkuat pandangan pribadi dan menyingkirkan informasi yang berbeda. Dalam konteks ini, pengguna media sosial lebih cenderung mengonsumsi konten yang sesuai dengan preferensinya, sehingga memperkuat bias kognitif dan menurunkan kapasitas untuk mempertimbangkan perspektif alternatif.

Hal ini menjadi semakin problematik ketika dikaitkan dengan literasi digital sebagaimana didefinisikan oleh Paul Gilster (1997), yaitu kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai format digital secara kritis. Rendahnya literasi media di masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa banyak individu belum mampu melakukan *critical thinking*, *information evaluation*, dan *awareness of bias* secara memadai. Akibatnya, media tidak lagi menjadi ruang dialog yang sehat, melainkan arena konflik yang memperkuat polarisasi sosial.

Mengaitkan konsep *filter bubble*, literasi digital Paul Gilster, dan rendahnya kemampuan berpikir kritis, kondisi ini memiliki implikasi serius terhadap pembangunan nasional. Ketika sumber daya manusia (SDM) tidak mampu memilah informasi secara objektif sering tergiring oleh opini media sosial tanpa verifikasi mereka kesulitan menentukan kebenaran berita. Padahal dalam konteks negara, SDM yang kritis dan bermutu adalah fondasi bagi pengambilan kebijakan yang tepat, inovasi yang berkelanjutan, serta peningkatan kapabilitas ekonomi dan sosial. Namun, fakta menunjukkan masih terdapat defensif konfirmasi yang kuat di masyarakat Indonesia, menyebabkan banyaknya masyarakat yang bertanya “*ini bener atau tidak*” saat membaca berita indikasikan rendahnya literasi media dan dari kualitas pemberitaan itu sendiri yang sering menggunakan opini.

Dikutip dari Media Indonesia, menunjukkan data terkini yang mendukung analisis ini. Survei Kominfo-KIC 2022 mencatat indeks literasi digital Indonesia berada di level “sedang” 3,54 dari skala 1–5. Lalu, dari data academia, APJII melaporkan 215,6 juta pengguna internet (2022–2023), dengan generasi muda yang dominan cenderung malas memverifikasi berita, hanya membaca judul dan meneruskan hoaks. Dilansir dari journal.uc.ac.id Penelitian Jurnal VICIDI (2024) menemukan pengguna 19–23 tahun yang menghabiskan 5–10 jam/media sosial cenderung terdistraksi dan kehilangan motivasi mencari informasi mendalam.

Secara keseluruhan, polarisasi opini yang dipicu oleh algoritma dan bias kognitif bukan hanya memperburuk kultur diskursus, tetapi juga berdampak langsung ke kualitas pengambilan keputusan. Hal ini mengancam

efektivitas pembangunan negara karena SDM yang tidak terlatih berpikir kritis, kurang mandiri dalam mengevaluasi informasi, dan cenderung termobilisasi oleh narasi emosional. Padahal untuk mencetak SDM unggul dan bangsa yang berdaya saing, diperlukan generasi yang memiliki kemampuan *critical thinking*, literasi informasi memadai, serta kesadaran digital yang kuat, bukan yang tenggelam dalam polarisasi dan memilih jalan paling gampang dalam menanggapi isu publik.

Untuk itu kami berpendapat bahwa dalam mengatasi masalah disinformasi dan penyebaran berita simpang siur peningkatan literasi pada SDM di Indonesia adalah langkah esensial yang paling berpengaruh. Dengan literasi yang baik, masyarakat akan terbiasa melakukan riset informasi dan tidak lagi menerima berita secara mentah-mentah. Namun justru hal ini menjadi tantangan besar di Indonesia, diperparah oleh kurangnya perhatian serius dari pemerintah terhadap isu ini. Padahal, urgensi dan dampak besar dari literasi informasi sangatlah jelas.

C. LITERASI DI INDONESIA TERGOLONG RENDAH

Rendahnya tingkat literasi di Indonesia bukan sekadar data statistik yang bisa diabaikan, melainkan sebuah gejala struktural yang mencerminkan lemahnya pembangunan intelektual bangsa. Fenomena ini mengindikasikan bahwa mayoritas siswa yang kelak menjadi bagian dari masyarakat dewasa tidak memiliki kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menafsirkan informasi secara kritis. Hal ini diperparah dengan data rata-rata IQ penduduk Indonesia yang berada di angka 78 (menurut laporan World Population Review 2022) menunjukkan kapasitas berpikir kritis yang relatif rendah dibanding negara-negara lain. Kondisi ini menjadi ladang subur bagi berkembangnya disinformasi, hoaks, dan manipulasi opini publik, terutama melalui media digital. Masyarakat yang belum terbiasa memilah sumber informasi secara kritis akan lebih mudah terseret dalam arus narasi palsu, propaganda politik, atau fanatisme sempit.

Pada awalnya menurut Abidin et al (2017:1), seseorang dikatakan sebagai individu yang literat jika ia mampu membaca dan menulis. Definisi

ini kemudian berkembang menjadi kemampuan berbahasa mencakup kemampuan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Kemampuan literasi bidang ilmu inilah yang harus dikuasai oleh siswa agar bisa hidup pada abad ke-21. Kemampuan literasi yang mencakup kemampuan membaca dan menulis ini belum menjadi budaya di masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan TIMSS dan PIRLS (Mullis et al, 2012:38-40) menunjukkan bahwa tingkat membaca pemahaman siswa kelas IV SD di Indonesia hanya mencapai skor 428, di bawah rata-rata skor internasional yaitu 500. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa di Indonesia masih menempati urutan bawah dibandingkan dengan negara lain. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan seperti sekolah harus berperan dalam menumbuhkan budaya literasi (Primayana, 2019).

Politik dan budaya literasi kita seolah-olah memang tidak berkaitan. Sepertinya elit-elit politik kita tidak pernah peduli terhadap budaya literasi. Diskusi-diskusi anggota Dewan lebih banyak menyentuh persoalan ekonomi, skandal politik, transportasi, korupsi, sampai konflik antar berbagai kepentingan di negara kita tercinta ini. Bahkan celakannya lagi, diskusi akan menjadi begitu panjang dan bersemangat, bila itu menyangkut kepentingan mereka sendiri. Gedung baru, kenaikan tunjangan, dan penyediaan fasilitas-fasilitas yang menunjang kenyamanan mereka dalam 'memperjuangkan' nasib rakyat.

Budaya literasi sejatinya membutuhkan dukungan politik dari pemerintah dan DPR. Budaya literasi berkaitan dengan masa depan bangsa, arena itu perlu mendapat perhatian serius. Selama ini dukungan dari pemerintah masih bersifat temporer. Baru ada perhatian jika peringatan hari-hari tertentu seperti sperayaan Hari Buku Nasional beberapa bulan yang lalu, yang pelaksanaannya pun hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya, berlangsung sepi, baik secara ceremonial maupun subtansial. Tidak ada kegiatan yang benar-benar menghentak atau menyulut kesadaran baru tentang buku, tentang budaya literasi.

Sementara hanya sedikit pemerintah daerah yang benar-benar peduli terhadap budaya literasi. Budaya ini masih dinomorduakan. Dianggap kurang

penting dari pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Hanya sedikit pemerintah daerah yang benar-benar peduli terhadap budaya literasi. Hal ini ditambah dengan ketidakpedulian elit-elit politik, ekonomi, dan budaya di daerah terhadap pengembangan budaya literasi. Sekali lagi, buku dianggap tidak lebih penting daripada nasi dan roti. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota hanya sedikit menganggarkan dana untuk perpustakaan lokal. Sementara anggaran untuk fasilitas Dewan terus naik secara signifikan dari waktu-waktu, tak peduli kinerja mereka yang masih sangat sering mengecewakan.

Sebenarnya isu budaya literasi di Indonesia sejak berkembang sejak masa Orde Lama. Pada masa itu sejumlah anggota DPR-GR yang dibentuk Presiden Soekarno menaruh perhatian serius terhadap budaya literasi. Akan tetapi hingar-bingar politik memungkirkkan budaya literasi perhatian publik.. Walaupun Soekarno adalah seorang pembaca dan penulis buku, namun tidak tampak upayanya untuk menyebarkan budaya literasi.

Pada masa Orde Baru, kondisinya nyaris tidak berubah. Rezim ini tidak punya perhatian banyak pada buku. Indonesia bahkan pernah mengalami krisis buku pada tahun 1973 di mana tak satu pun buku terbit pada tahun itu. Rezim Orde Baru juga tidak punya minat kepada intelektualisme. Banyak intelektual yang dipenjara karena menentang kebijakan Presiden Soeharto. Memang pada masa akhir jabatan Presiden Soeharto sempat diadakan Bulan Buku Nasional tapi hanya bersifat hangat-hangat tahi ayam. Soeharto dan para menterinya tak pernah kelihatan suka membaca buku. Ia lebih suka memberi petunjuk kepada aparatnya. Rezim ini juga suka melarang buku-buku tertentu yang bisa menggoyangkan kekuasaan pemerintah dan militer.

Padahal seharusnya literasi digital menjadi fokus khusus untuk diberikan perhatian lebih, karena inilah yang menjadi sumber solusi untuk kemajuan SDM Indonesia. Tujuan literasi digital adalah mendidik masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dan komunikasi dengan menggunakan teknologi digital. Pada akhirnya masyarakat mampu mencari, menilai, menggunakan, dan membuat informasi secara bertanggungjawab. Selain itu, literasi digital mengajarkan masyarakat menggunakan media

digital secara bertanggung jawab sesuai dengan konsekuensi hukumnya yang merujuk pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam gerakan literasi digital masyarakat misalnya melakukan sosialisasi mengenai dampak hukum yang timbul serta etika dalam menggunakan media digital secara arif dan bijaksana. Langkah lain yakni menggunakan aplikasi web resmi pemerintah yang tersedia seperti Google play di mobilephone untuk mencari data atau informasi yang benar. Selanjutnya dengan penyebaran informasi lewat media sosial. Pemanfaatan medsos untuk menyebarkan informasi penting. Namun diperlukan sikap kritis dan dalam menyebarkan pesan dan pengetahuan yang diperolehnya(Sutrisna, 2020).

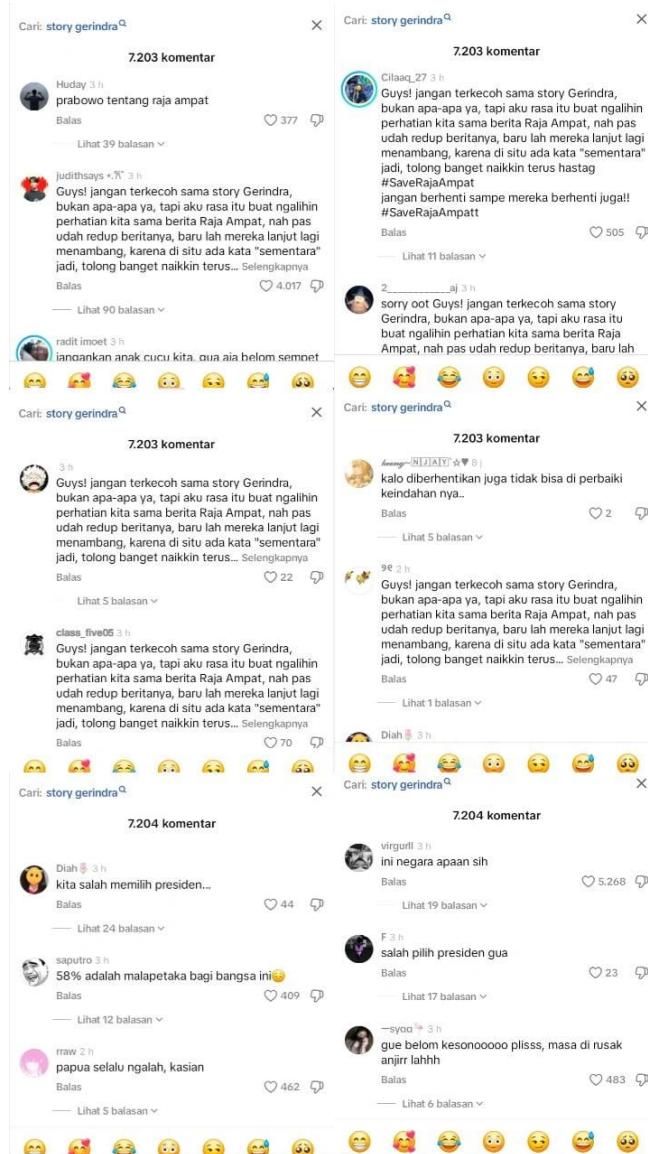
D. HUBUNGAN ANTARA LITERASI MEDIA DENGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Dengan era digital yang sangat cepat dan masif seperti sekarang ini, literasi media menjadi salah satu kemampuan dasar yang menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Literasi media bukan hanya sekedar kemampuan membaca atau menulis di media, tetapi mencakup keterampilan yang kritis dalam mengakses, mengevaluasi, menganalisis, dan menciptakan informasi melalui berbagai bentuk media. Dalam konteks pembangunan manusia atau bahkan negara, literasi media merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia, infrastruktur negara, dan untuk menjadikan warga negara yang sadar, kritis, dan berdaya.

Menurut Paul Gilster (1997), literasi media adalah bagian dari digital literacy, yaitu kemampuan untuk tidak hanya memahami informasi, tetapi juga berpikir kritis terhadapnya. Sementara itu UNESCO menekankan bahwa literasi media dan informasi (MIL) sangat penting dalam mendukung partisipasi aktif dalam masyarakat demokratis, serta sebagai modal utama dalam pembangunan SDM berbasis pengetahuan.

Berdasarkan pendapat Potter, dalam meraih kesadaran kritis bermedia melalui literasi media terdapat 7 keterampilan (*skill*) yang dibutuhkan. Tujuh keterampilan tersebut yaitu: analisis, evaluasi, pengelompokan, induksi,

deduksi, sintesis, dan *abstracting*. Saat melakukan analisis dapat menuntut kita mengurangi pesan yang kita terima dari elemen-elemen yang berarti. Pengelompokan (*grouping*) adalah menentukan elemen-elemen yang memiliki kemiripan dan elemen-elemen yang berbeda untuk dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berbeda. Induksi adalah mengambil kesimpulan atas pengelompokan di atas kemudian melakukan generalisasi atas pola-pola elemen tersebut ke dalam pesan yang lebih besar. Deduksi menggunakan prinsip-prinsip umum untuk menjelaskan sesuatu yang spesiik. Sintesis adalah mengumpulkan elemen-elemen tersebut menjadi satu struktur baru. Terakhir, *abstracting* adalah menciptakan deskripsi yang singkat, jelas, dan akurat untuk menggambarkan esensi pesan secara lebih singkat dari pesan aslinya.



Gambar 1. Beberapa komentar netizen yang kontra dengan kasus di Raja Ampat

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa, komentar kontra terhadap isu yang disorot. Namun, yang menarik adalah kemunculan pola linguistik yang seragam di antara komentar-komentar tersebut. Kalimat-kalimat seperti “guys, jangan terkecoh”, muncul berulang dengan sedikit variasi, baik dari segi struktur maupun diksi. Hal ini mengindikasikan bahwa komentar-komentar tersebut bukan merupakan bentuk ekspresi individu yang organik, melainkan memiliki kemungkinan kuat sebagai hasil dari penyebaran narasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Fenomena ini berkaitan erat dengan konsep agenda setting dan framing dalam teori komunikasi massa. Menurut McCombs dan Shaw (1972), media tidak hanya memberitakan informasi, tetapi juga menentukan topik apa yang dianggap penting. Dalam konteks ini, komentar-komentar yang dikemas secara template berfungsi sebagai bagian dari proses framing, yaitu upaya membentuk cara pandang publik terhadap suatu isu melalui penekanan aspek-aspek tertentu secara repetitif.



Gambar 2. Beberapa komentar netizen yang pro dengan kasus di Raja Ampat

Jika dilihat dari kacamata literasi media, Gambar 2 ini menjadi contoh bagaimana informasi visual yang seharusnya bersifat empiris yakni bisa diamati dan diverifikasi telah dimaknai ulang secara subjektif serta emosional oleh para audiens. Ini sejalan dengan pandangan Paul Gilster (1997), bahwa literasi media bukan hanya soal memahami isi tapi juga memahami proses produksi, konteks penyebaran, dan kepentingan di balik pesan.

Gambar ini mengalami yang disebut sebagai framing visual, yaitu proses di mana elemen-elemen tertentu dalam gambar ditonjolkan atau dimanipulasi (melalui caption, angle, atau komentar netizen) agar membentuk narasi tertentu. Narasi ini kemudian digunakan untuk menggiring opini publik ke arah tertentu, bukan untuk menginformasikan secara netral.

Akibatnya, yang terjadi bukanlah diskusi rasional berdasarkan data, tapi justru pembentukan kubu berdasarkan interpretasi emosional dan identitas kelompok. Hal ini memperlihatkan bagaimana rendahnya literasi media dapat memperparah polarisasi, karena publik gagal membedakan mana yang fakta empiris dan mana yang konstruksi opini.

KESIMPULAN

Dalam penilitian yang kami lakukan mengenai bagaimana literasi digital yang terjadi di masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Seiring dengan perkembangan teknologi, cara media menyajikan informasi juga berkembang mengikuti arah masyarakat mengkonsumsi media. Dengan kemajuan yang ada, masyarakat cenderung tertarik dengan konsumsi media yang singkat, seperti aplikasi tiktok yang menyediakan video yang hanya berdurasi kurang lebih 15 detik atau lebih bahkan ada juga masyarakat yang hanya mengkonsumsi berita berbentuk foto dengan judul satu kalimat dan menelannya mentah-mentah. Hal ini membuktikan bahwa literasi digital di Indonesia sudah dalam kondisi yang gawat dan menjadi masalah utama dalam pengembangan SDM.

Saat ini, kita perlu terus meninjau dan memperbarui keterampilan digital yang pernah diajarkan sebagai hasil dari teknologi dan inovasi baru seperti, kecerdasan buatan (AI), data besar (*big data*), buku besar digital (*blockchain*), komputasi awan (*cloud computing*), *Internet of Things* (IoT), pembelajaran mesin (*machine learning*), dan aplikasi seluler (*mobile applications*). Secara garis besar, keterampilan digital terdiri atas tiga level, yakni dasar (*basic*), menengah (*intermediate*), dan lanjutan (*advanced*). Banyak kebijakan pengembangan keterampilan digital di berbagai negara mengacu pada ketiga level ini. Meskipun demikian, dalam praktik, keterampilan digital berada dalam suatu kontinum. Oleh karena itu, kategorisasi tiga level ini dimaksudkan untuk memberikan definisi umum yang dapat membantu mengarahkan kebijakan nasional suatu negara dalam pengembangan keterampilan literasi digital.

Ketiga level keterampilan digital di atas berkembang dalam suatu garis kontinum. Oleh karena itu, keterampilan digital harus terus diperbarui sejalan dengan perubahan teknologi. Dalam konteks ini, kerangka kompetensi literasi digital yang dikembangkan oleh organisasi dan lembaga internasional berperan penting dalam menangkap berbagai jenis keterampilan serta perubahan ini, sehingga memungkinkan pembuat kebijakan dan penyedia layanan keterampilan digital untuk memastikan bahwa program dan kurikulum pelatihan mereka tetap relevan dan terkini.

Studi kasus permasalahan tambang Raja Ampat, yang melibatkan dua akun TikTok dengan narasi berseberangan, secara gamblang merefleksikan rendahnya literasi media masyarakat Indonesia. Alih-alih mendorong dialog berbasis data, konten-konten tersebut justru memperkuat polarisasi dan memicu filter bubble (Eli Pariser), di mana algoritma media digital mengurung individu dalam *echo chamber*. Hal ini menunjukkan bahwa banyak individu belum mampu melakukan *critical thinking*, *information evaluation*, dan *awareness of bias* secara memadai. Data survei Kominfo-KIC 2022 yang menempatkan indeks literasi digital Indonesia pada level "sedang", serta kecenderungan generasi muda untuk malas memverifikasi berita, semakin memperkuat urgensi masalah ini. Fenomena ini berdampak serius pada kualitas pengambilan keputusan publik dan menghambat upaya pembangunan nasional, karena SDM yang tidak terlatih berpikir kritis akan mudah digiring opini tanpa verifikasi, merujuk pada adanya *defensive confirmation* yang kuat.

Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa untuk mengatasi disinformasi dan penyebaran berita simpang siur, peningkatan literasi SDM di Indonesia adalah langkah esensial dan paling berpengaruh. Literasi yang komprehensif akan membiasakan masyarakat untuk melakukan riset informasi dan tidak lagi menerima berita secara mentah-mentah. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama karena kurangnya perhatian serius dari pemerintah terhadap isu krusial ini. Padahal, urgensi dan dampak positif dari literasi informasi terhadap pembentukan SDM unggul dan bangsa yang berdaya saing sangatlah jelas. Tanpa fondasi literasi media yang kuat, Indonesia akan terus rentan terhadap manipulasi opini dan kesulitan dalam mencetak generasi yang mandiri dalam mengevaluasi informasi dan mengambil keputusan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bashori, K. (2025, Januari 20). *Krisis Literasi Digital*. Media Indonesia. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/opini/735985/krisis-literasi-digital>
- Dewi, P. Y. A. (2019). Gerakan Membaca di Awal Pelajaran Guna Membangun Budaya Literasi di Sekolah Dasar. *Jurnal Literasi*, 3(2), 77–85.
- Ginanjar, R. P. A., & Ranggasari, R. (2024, November 13). Berapa Rata-rata IQ Orang Indonesia? Ini Penjelasannya. Tempo.co. Retrieved from <https://www.tempo.co/gaya-hidup/berapa-rata-rata-iq-orang-indonesia-ini-penjelasannya-1167683>
- Hidayatullah, Rahmat. *Panduan Literasi Digital Bagi Guru Madrasah*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2022.

- Mansyur, U. (2020, Oktober). Minat Baca Mahasiswa: Potret Pengembangan Budaya Literasi Di Universitas Muslim Indonesia. *Jurnal Literasi*, 4(2).
- Nariswari, N. R. (2024, Desember 6). Pengaruh Media Sosial Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Daya Fokus Masyarakat Indonesia. *Jurnal VICIDI*. Retrieved from <https://journal.uc.ac.id/index.php/vicidi/article/view/5191>
- Nisa, K. (2024). Peran Literasi di Era Digital dalam Menghadapi Hoaks dan Disinformasi di Media Sosial. *Impressive: Journal of Education*, 2(1). <https://doi.org/10.61502/ijoe.v2i1.75>
- Prayitno, S. (2021, September). Komunikasi Pemasaran Global Terpadu: Tantangan di Era Digital. *Journal of Strategic Communication*, 12(1), 27-39.
- Sarjito, A. (2024, November). Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(2), 175-186.
- Shihab, Najelaa dan Komunitas Guru Belajar. *Literasi Menggerakkan Negeri*. Tangerang Selatan: Penerbit Literati, 2019.
- Wahyudi, T. (2025, Maret 18). *Rendahnya Literasi Komentar di Media Sosial: Cermin Kegagalan Berpikir Kritis*. PanselaNews.com. Retrieved from <https://panselanews.com/rendahnya-literasi-komentar-di-media-sosial-cermin-kegagalan-berpikir-kritis/>